

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi dan modernisasi yang meluas hampir ke seluruh dunia telah menghilangkan banyak batasan yang sebelumnya dianggap tidak terhindarkan. Saat ini, hubungan ekonomi antar negara tidak lagi menjadi kendala, dengan batas-batas yang semakin kabur atau bahkan tidak lagi terlihat (*borderless*). Salah satu dampak utama dari globalisasi adalah munculnya pasar global yang mendorong persaingan bebas. Baik langsung maupun tidak langsung, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga merasakan pengaruh globalisasi, terutama melalui meningkatnya investasi asing yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu membangun fondasi yang kuat guna menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, seperti menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, menegakkan hukum, perbaikan infrastruktur, menjaga stabilitas makroekonomi, serta meningkatkan daya saing.

Daya saing (*competitiveness*) dalam hal ini merupakan konsep yang memiliki berbagai dimensi. *World Economic Forum* (WEF) melalui *The Global Competitiveness Report* (Schwab & Zahidi, 2020) mendefinisikan Daya saing (*competitiveness*) mengacu pada kemampuan suatu negara dalam membangun dan mempertahankan lingkungan yang mendukung tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakatnya. Hal ini dicapai melalui peningkatan produktivitas, dorongan terhadap inovasi, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Produktivitas memainkan peran penting dalam menentukan tingkat pengembalian investasi serta menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan kata lain, semakin tinggi daya saing suatu perekonomian, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan angka pertumbuhan. Selain itu, Nurjanah et al. (2022) menambahkan bahwa daya saing menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan yang lebih baik bagi suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Semakin besar potensi yang dimiliki suatu daerah, semakin tinggi pula tingkat daya saingnya. Dengan daya saing yang tinggi, kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut juga akan meningkat.

Daya saing dan investasi memiliki keterkaitan yang erat karena investasi berperan penting dalam memperkuat daya saing suatu negara dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia. Investasi berkontribusi untuk memperkuat stabilitas dan memperluas inklusi dalam ekonomi, yang merupakan komponen penting dari daya saing. Negara-negara yang menarik investasi di bidang-bidang utama seperti infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan inovasi cenderung meningkatkan daya saing mereka dengan membuat lingkungan yang kondusif guna meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Investasi dalam pengembangan keterampilan, terutama di bidang yang sedang berkembang dan teknologi digital, sangat penting bagi negara-negara untuk tetap kompetitif di pasar global (Schwab & Zahidi, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, dengan mendorong iklim investasi yang kondusif dan mempromosikan investasi strategis, negara-negara dapat meningkatkan daya

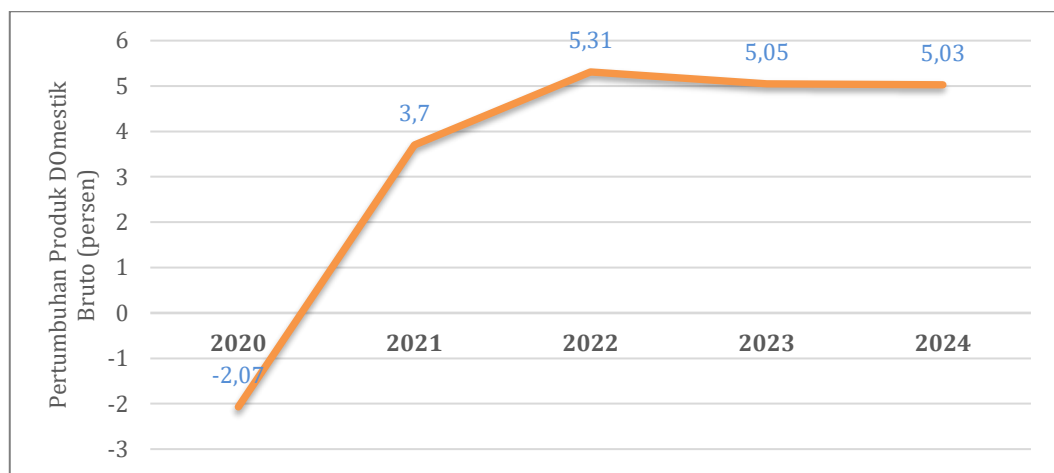
saing mereka dengan meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Di Indonesia, guna mewujudkan masyarakat sejahtera, diperlukan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan yang didasarkan pada demokrasi ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bernegara, memperkuat kedaulatan politik dan ekonomi, serta mendorong investasi guna mengoptimalkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi nyata. Investasi sendiri mencakup segala bentuk penanaman modal, baik dari investor domestik maupun asing, yang bertujuan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Investasi atau penanaman modal memiliki peran krusial dalam perkembangan suatu negara karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu pilar utama dalam peningkatan perekonomian, investasi menjadi faktor penting, terutama bagi negara-negara yang masih berstatus sebagai negara berkembang karena hal ini dapat mempercepat proses pembangunan. Selain sebagai penggerak ekonomi, investasi juga berfungsi sebagai indikator untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi juga dapat meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan nasional sehingga investasi memiliki pengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Investasi bukan menjadi suatu hal yang mudah untuk direalisasikan secara optimal. Meskipun investasi dapat mendorong kemajuan bagi perusahaan, daerah, atau sektor tertentu dengan memberikan suntikan dana untuk pengembangan, kenyataannya investasi di Indonesia masih belum sepenuhnya maksimal. Banyak

daerah yang belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Misalnya, hanya beberapa wilayah yang berhasil memanfaatkan potensinya secara efektif, seperti Bali di sektor pariwisata, Jakarta dalam bidang usaha seperti perumahan, kawasan industri, dan perkantoran, serta Surabaya yang berkembang di sektor properti (Tamia et al., 2021).

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2020-2024

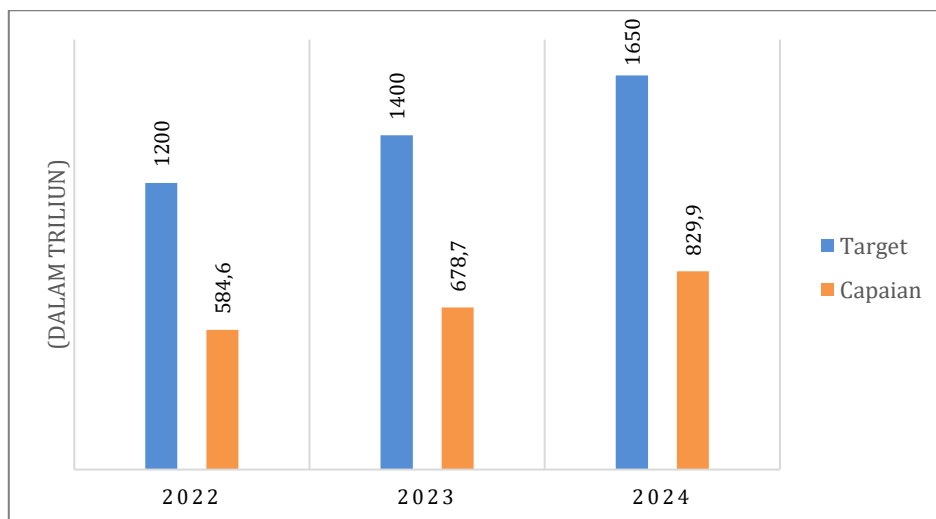


Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) dari rentang tahun 2020-2026 seperti pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami krisis ekonomi karena adanya pandemi virus Covid-19. Setelah pandemi berlalu, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dan mengalami pertumbuhan dengan puncaknya yaitu di tahun 2022. Namun, data terakhir tahun 2024 ternyata laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sekitar 0,72% dari tahun 2022.

Data terakhir realisasi investasi di Indonesia berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada semester I (Januari-Juni) tahun 2022-2024 belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, investasi ditargetkan sebesar 1200 Triliun dan terealisasi 584,6 Triliun. Pada tahun 2023, investasi ditargetkan sebesar 1400 Triliun dan terealisasi 678,7 Triliun. Kemudian pada tahun 2024, investasi yang ditargetkan sebesar 1650 Triliun dan terealisasi 829,9 Triliun atau sekitar 50,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia masih belum optimal.

Gambar 1. 2 Data Target dan Capaian Realisasi Investasi Semester I (Januari-Juni) Tahun 2022-2024



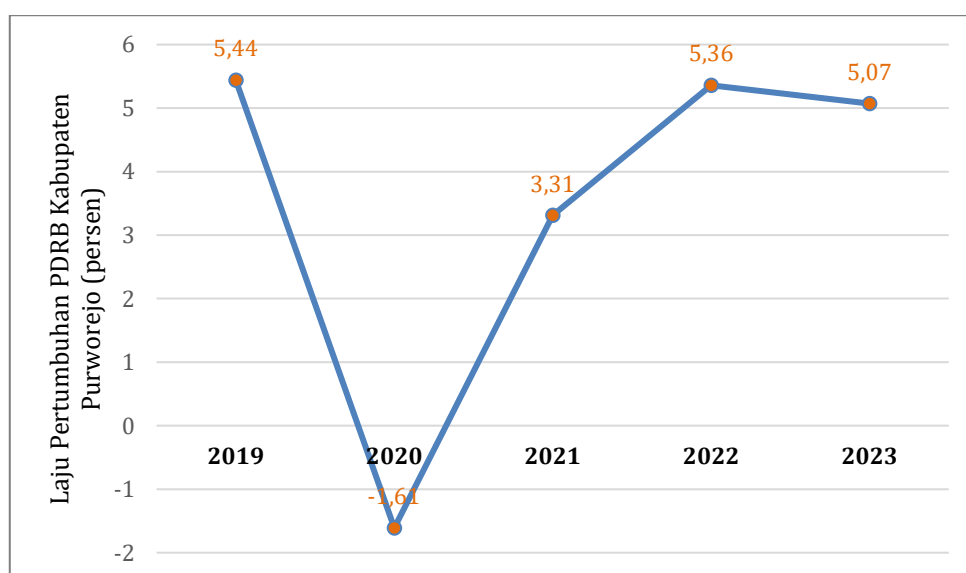
Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (2024)

Perbaikan iklim investasi menjadi salah satu faktor penting yang optimal untuk mengejar ketertinggalan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan investasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan signifikan dalam perkembangan

demokrasi di Indonesia, dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah, khususnya kabupaten/kota, dalam mengelola urusannya. Undang-undang ini memperkuat otonomi daerah, yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya dengan adanya otonomi daerah ini, tentunya dengan tetap memegang prinsip pemerataan, demokrasi, keadilan, kekhususan, keistimewaan, serta mengoptimalkan potensi dan keberagaman yang ada dalam wilayah NKRI (Widjaja, 2005).

Kabupaten dan kota di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya dan kekayaan yang dimiliki berdasarkan kapasitas dan potensi masing-masing. Kabupaten dan kota berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan adanya otonomi daerah.

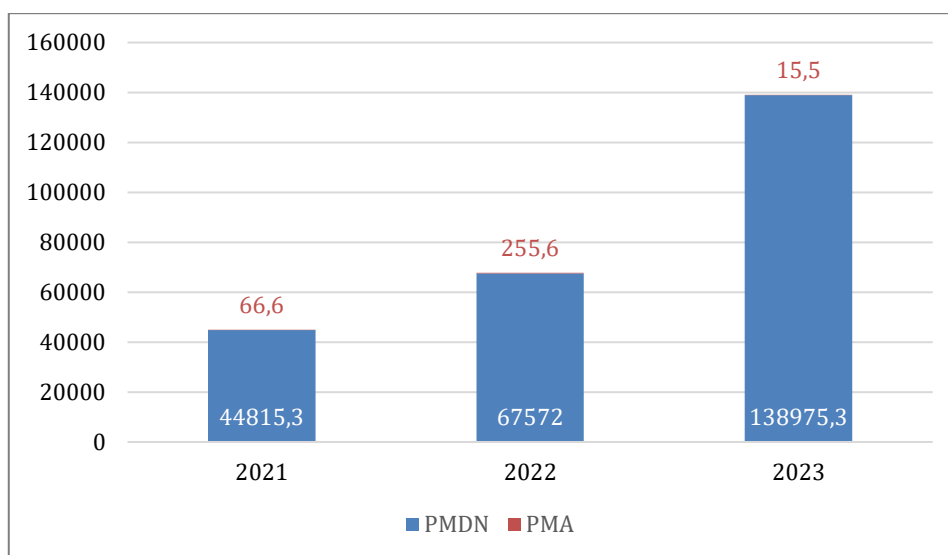
Gambar 1. 3 Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Purworejo (2024)

Perekonomian Kabupaten Purworejo tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,07 persen, tetapi hal ini masih lebih melambat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,36 persen. Puncak tertinggi pertumbuhan perekonomian di Kabupaten purworejo berada pada tahun 2019 sebesar 5,44 persen dan yang terendah berada pada tahun 2020 karena terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, Investasi menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga setiap wilayah berupaya menarik minat investor dengan merancang berbagai penawaran terkait potensi yang dimilikinya untuk menarik investasi. Menanggapi hal tersebut, Kabupaten Purworejo sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah juga turut memanfaatkan otonomi dengan mengembangkan daerahnya.

Gambar 1. 4 Capaian Realisasi Investasi Kabupaten Purworejo (dalam US\$. Ribu)

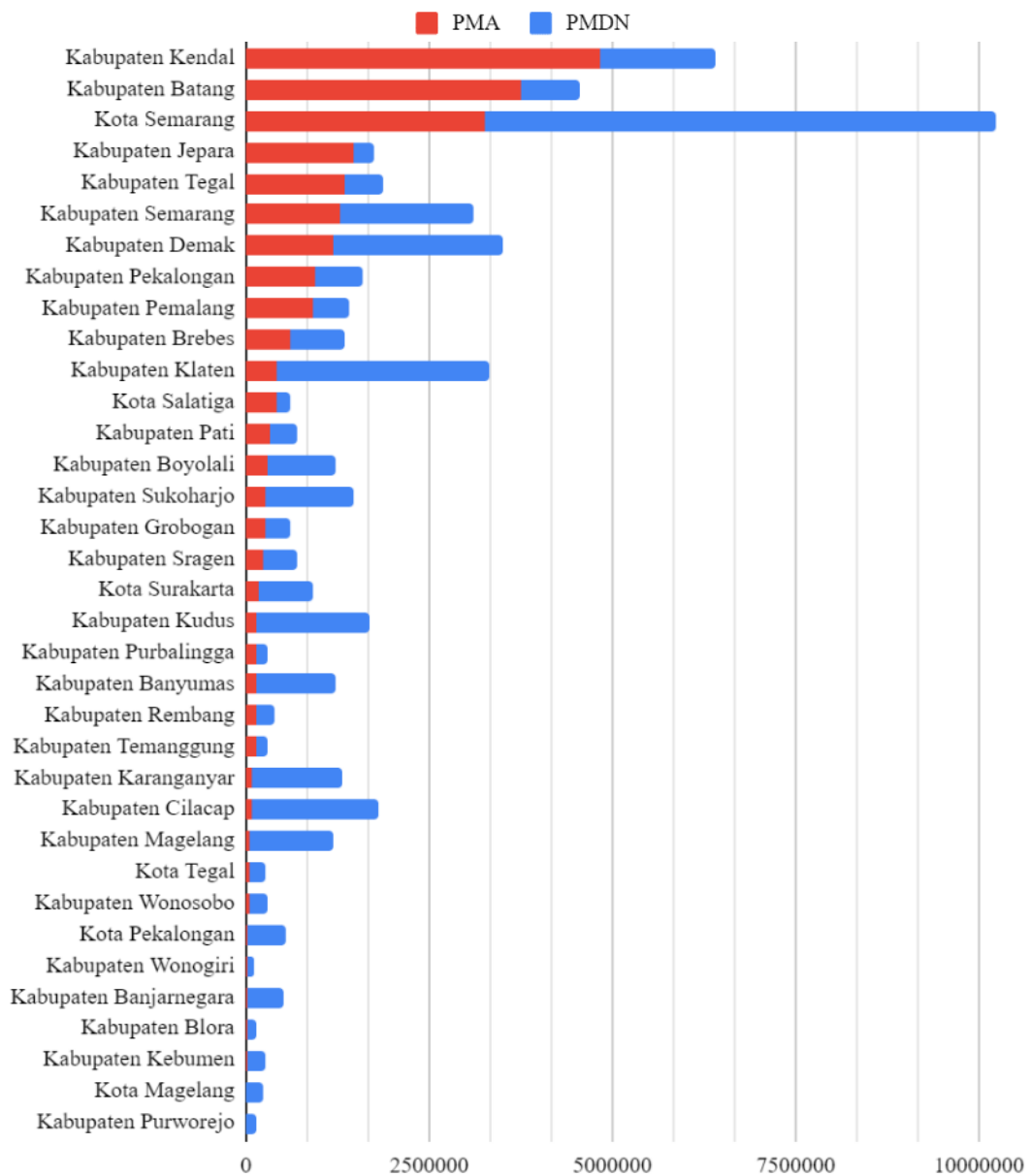


Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (2024)

Realisasi Investasi di Kabupaten Purworejo selama tiga tahun mulai dari 2021-2023 menunjukkan tren positif dalam hal realisasi PMDN seperti yang

ditunjukkan pada gambar 1.4. Namun, ternyata dalam hal realisasi PMA terjadi penurunan di tahun 2023 yang hanya mendapatkan sebesar 15,5 ribu US\$ atau setara sekitar Rp. 229,4 juta setelah sebelumnya terjadi kenaikan di tahun 2022.

Gambar 1. 5 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2023 Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Diolah dari Portal Data Provinsi Jawa Tengah (2024)

Berdasarkan data *Time Series* Perkembangan Investasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2023, Kabupaten Purworejo juga ternyata berada di posisi yang memang perlu mendapatkan sebuah perhatian.

Seperti yang tertera pada gambar 1.5, data terakhir tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo berada pada peringkat ke-35 atau terakhir dalam hal realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan ke-33 dalam hal realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari total 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Data tersebut juga menunjukkan bahwa daya saing daerah (*competitiveness*) serta tingkat penanaman modal atau investasi di Kabupaten Purworejo dapat terbilang sangat rendah jika melihat perbandingan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Tengah. Bahkan jika dilihat dalam skala yang lebih kecil atau berdasarkan karesidenan, yaitu Karesidenan Kedu (Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen), Kabupaten Purworejo masih berada pada peringkat yang terakhir seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Peringkat investasi PMA dan PMDN di Karesidenan Kedu

No	Kab/Kota	PMA (Dalam Rp. Juta)	PMDN (Dalam Rp. Juta)
1	Kabupaten Magelang	59.344,98	1.124.874
2	Kabupaten Temanggung	129.039,59	172.781
3	Kabupaten Wonosobo	37.790,29	257.592
4	Kabupaten Kebumen	5.400,51	257.838
5	Kota Magelang	4.377,84	237.692
6	Kabupaten Purworejo	229,4	138.975

Sumber : Diolah dari Portal Data Provinsi Jawa Tengah (2024)

Jumlah investasi PMDN di Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 138,9 M dan investasi PMA sebesar Rp. 229,4 juta pada tahun 2023, sedangkan investasi PMDN tertinggi di Karesidenan Kedu berada di Kabupaten Magelang dengan jumlah sebesar Rp. 1,1 T dan investasi PMA tertinggi berada di Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 129 M. Adapun menurut Tamia, et al. (2021),

Kabupaten Purworejo memiliki potensi investasi yang besar, terutama sejak menjadi bagian dari kawasan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) pada 2019. Keberadaan bandara ini meningkatkan konektivitas transportasi udara serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulon Progo, Purworejo turut merasakan dampak positif dari YIA. Untuk memaksimalkan peluang ini, wilayah tersebut ditetapkan sebagai bagian dari Destinasi Super Prioritas Borobudur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, yang bertujuan mempercepat pembangunan ekonomi dan pengembangan pariwisata. Jika dilihat dari sisi lain, hal ini juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat agar pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat terwujud.

Kabupaten Purworejo memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan industri yang berpeluang untuk dikembangkan. Destinasi wisata alamnya meliputi kawasan pegunungan seperti Puncak Khayalan Sigendol, Curug Muncar, dan Goa Seplawan, serta wisata pantai seperti Pantai Ketawang dan Pantai Jatimalang yang menawarkan keindahan alam dan aktivitas perikanan. Di sektor industri, Kabupaten Purworejo telah menetapkan lebih dari 1.250 hektar lahan sebagai kawasan

peruntukan industri di delapan kecamatan, sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW. Dengan ketersediaan lahan luas dan populasi usia produktif yang mencapai hampir 70%, wilayah ini memiliki potensi besar untuk menarik investasi di sektor industri dan konstruksi.

Kabupaten Purworejo juga menjadi lokasi pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Purworejo. Proyek ini merupakan bagian dari pembangunan 61 bendungan nasional oleh Kementerian PUPR untuk meningkatkan ketahanan pangan dan air di Jawa Tengah. Bendungan Bener memiliki kapasitas tampungan sekitar 92 juta m³ dan dapat mengairi 15.519 hektar lahan irigasi. Selain itu, bendungan ini menyuplai 1.500 liter per detik air baku untuk rumah tangga, perkotaan, dan industri di Purworejo, Kebumen, dan Kulon Progo, serta mendukung pasokan air bagi Bandara YIA (Kementerian PUPR, 2023). Maka dari itu, proyek pembangunan Bendungan Bener ini memiliki potensi yang cukup besar yang dapat memberikan *multiplier effect* terhadap berbagai sektor di daerah.

Gambar 1. 6 Kondisi Jalan Kabupaten, Purworejo



Sumber : Dokumentasi Penulis

Meskipun Kabupaten Purworejo memiliki potensi besar dalam sektor industri dan pariwisata, berbagai tantangan masih dihadapi dalam upaya menarik investasi. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur, khususnya aksesibilitas jalan yang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan logistik dan distribusi bagi investor. Kondisi jalan yang belum optimal dapat menghambat kelancaran arus barang dan jasa, sehingga menurunkan daya tarik investasi daerah. Resistensi masyarakat terhadap investasi juga menjadi faktor penghambat yang perlu mendapatkan perhatian serius. Beberapa kelompok masyarakat masih memiliki persepsi negatif terhadap investasi, baik karena kekhawatiran terhadap perubahan sosial-budaya, dampak lingkungan, maupun kurangnya pemahaman tentang manfaat ekonomi yang dapat diperoleh.

Peran pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan investasi sangat penting untuk menciptakan efisiensi serta membangun iklim investasi yang kondusif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang memiliki peran dalam merumuskan strategi serta menghadirkan berbagai inovasi guna meningkatkan pelayanan perizinan dan mendorong pertumbuhan investasi di daerah.

Hal tersebut menjadi dasar penulis untuk melakukan analisis terkait Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Daerah. Selain itu, kondisi internal dan eksternal terkait peningkatan iklim investasi di Kabupaten Purworejo juga akan dikaji lebih dalam sehingga dapat menghasilkan sebuah strategi yang tepat dan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat, mempercepat pembangunan nasional, hingga mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan/ SDGs di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, peneliti untuk tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Daerah”**.

1,2 Identifikasi Masalah

Upaya peningkatan iklim investasi di Kabupaen Purworejo masih masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diatasi, yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo mengalami perlambatan, tahun 2023 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,07%, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
- b. Daya saing investasi Kabupaten Purworejo sangat rendah, yaitu peringkat terakhir (35 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah) dalam realisasi PMA dan peringkat ke-33 dalam realisasi PMDN.
- c. Kesenjangan antara potensi dan realisasi investasi, yaitu potensi yang baik tetapi belum diiringi dengan peningkatan signifikan realisasi investasi.
- d. Keterbatasan infrastruktur pendukung investasi, terutama aksesibilitas jalan yang masih belum optimal dalam mendukung mobilitas investor.
- e. Kondisi masyarakat masih memiliki persepsi negatif terhadap investasi, baik karena kekhawatiran maupun kurangnya pemahaman mengenai manfaat investasi bagi kesejahteraan daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diidentifikasi, peneliti menyusun beberapa poin permasalahan yang dirancang dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Purworejo dalam upaya meningkatkan iklim investasi daerah?
- b. Bagaimana strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan iklim investasi daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka peneliti merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Purworejo dalam upaya meningkatkan iklim investasi daerah?
- b. Menganalisis strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan iklim investasi daerah?

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosial khususnya dalam kajian ilmu administrasi publik serta menambah pengetahuan atau wawasan terkait dengan strategi DPMPTSP

Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan iklim investasi daerah. Melalui strategi pengembangan yang tepat, pemerintah dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan serta meminimalisir dampak negatif atau kemungkinan resiko yang akan terjadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian dengan topik serupa sehingga kegiatan penelitian dilakukan secara berkesinambungan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Memberikan pengetahuan dan wawasan serta dijadikan pembelajaran bagi peneliti dalam hal strategi pengembangan iklim investasi pada saat terjun di lapangan

2. Bagi pemerintah

Memberikan pandangan dan bahan analisis serta dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dan instansi terkait dalam mengembangkan iklim investasi daerah.

3. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran dan informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik dan pengembangan iklim investasi Kabupaten Purworejo.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun	Tujuan	Jenis dan Teori	Hasil Penelitian
1	Putra, M. K. Y. & Soenarko (2024)	Mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh DPMPTSP dalam mengelola investasi di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.	Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori SWOT dari Rangkuti untuk melakukan analisis data.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi prioritas strategi (<i>Strength-Opportunities</i>) memiliki bobot tertinggi dengan nilai 3,46 dan diikuti oleh strategi (<i>Weakness-Threat</i>) dengan nilai 3,26, ketiga ada (<i>Strength-Threat</i>) memiliki nilai bobot 3,08 dan terakhir ada strategi (<i>Weakness-Opportunities</i>) dengan nilai 2,70. Strategi DPMPTSP dalam pengelolaan investasi Di Kabupaten Pati memiliki kekuatan dan Peluang yang lebih besar.
2	Setyaji, I. P. (2023)	Mengkaji penerapan konsep <i>pentahelix</i> dalam optimalisasi investasi di kawasan <i>aerotropolis</i> Kabupaten Kulon Progo serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi konsep tersebut.	Penelitian metode kualitatif. Teori yang dijadikan acuan adalah teori <i>Collaborative Governance</i> dari Ansell & Gash, terdiri dari empat dimensi utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, serta proses kolaborasi.	Implementasi konsep <i>pentahelix</i> dalam proses kolaborasi untuk mengoptimalkan investasi di Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Namun, sejak awal tidak terdapat komitmen resmi di antara para pemangku kepentingan. Dengan kata lain, kolaborasi yang terjadi lebih didasarkan pada kepentingan masing-masing aktor yang terlibat.
3	Agustin, D. W.. (2022)	Menganalisis strategi yang diterapkan oleh DPMPTSP	Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teori strategi	Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

		dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Pemalang.	promosi dan strategi teknologi informasi	Pintu dalam meningkatkan investasi dilakukan melalui promosi langsung, pemanfaatan <i>website</i> , serta partisipasi dalam berbagai lokakarya investasi.
4	Huda, N. (2021)	Mengkaji strategi DPMPTSP dalam mendorong peningkatan investasi di Kota Palangka Raya. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam meningkatkan investasi di Kota Palangka Raya.	Jenis penelitian kualitatif dengan teori strategi pemasaran menurut Muhammad Syakir Sula dan teori faktor pendukung dan penghambat investasi menurut Eko Prasetyo.	Untuk meningkatkan investasi, DPMPTSP menerapkan inovasi melalui sistem perizinan berbasis digital, yaitu <i>Online Single Submission</i> (OSS), guna mempermudah proses perizinan bagi investor. Selain itu, sosialisasi terkait penggunaan sistem OSS serta promosi potensi dan peluang investasi dilakukan melalui pameran, media cetak, dan platform daring. Faktor-faktor yang mendukung peningkatan investasi meliputi terciptanya iklim investasi yang kondusif, prosedur yang sederhana, layanan yang efisien, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai. Namun, masih terdapat kendala seperti proses perizinan yang panjang dan kompleks, serta kurangnya informasi terkait jumlah investor syariah serta peluang investasi berbasis syariah.
5	Bakri, R. M. S., et al (2022)	Menganalisis pelaksanaan perencanaan strategis oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan investasi serta menentukan strategi melalui analisis SWOT.	Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik analisis data SWOT yang dikembangkan oleh David, serta didukung oleh teori Bryson terkait penyusunan perencanaan strategis	DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki faktor kekuatan dan ancaman yang lebih dominan dibandingkan kelemahan dan peluang. Oleh karena itu, strategi peningkatan investasi di wilayah ini difokuskan pada pemanfaatan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi tantangan yang ada.
6	Ananda, S., & Ardiansyah, M.	Mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh	Jenis penelitian kualitatif dengan teori perencanaan	Strategi DPMPTSP dalam pengembangan investasi di sektor pariwisata cukup efektif, namun masih

	(2024)	DPMPTSP dalam mengembangkan investasi di sektor pariwisata di Kabupaten Way Kanan, serta menganalisis aspek dan penghambat serta pendorong.	strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi menurut Fred David.	menghadapi hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan APBD, berdampak pada terbatasnya realisasi program kerja. Tantangan lain dalam implementasi strategi meliputi perubahan regulasi perizinan yang sering terjadi, sistem OSS yang masih dalam tahap pengembangan, serta kurangnya sumber daya manusia, baik di tingkat dinas maupun masyarakat, untuk mendukung inovasi di sektor pariwisata. Dalam evaluasi strategi, ditemukan bahwa program-program DPMPTSP Kabupaten Way Kanan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat, serta infrastruktur publik yang belum memadai menjadi faktor penghambat lainnya.
7	Regiyati, S., & Rusli, Z. (2021)	Menganalisis strategi serta kendala yang dihadapi oleh DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Pekanbaru.	Jenis penelitian kualitatif dengan teori strategi menurut Anatan dan Ellitan, yaitu strategi teknologi, inovasi, dan strategi operasional	Strategi DPMPTSP Kota Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal karena terkendala pandemi Covid-19 sehingga kegiatan terhenti sementara, namun investasi terus meningkat.
8	Polii, C. D., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021)	Mengkaji strategi promosi yang dilakukan oleh DPMPTSP dalam memperkenalkan potensi investasi di Kabupaten Minahasa Selatan serta menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat promosi tersebut.	Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan teori strategi praktik untuk menarik investasi, tenaga kerja, dan industri ke suatu wilayah, sebagaimana dikemukakan oleh Kuncoro. Strategi tersebut mencakup <i>Image Marketing</i> , <i>Attraction Marketing</i> , dan <i>Infrastructure</i>	DPMPTSP Kabupaten Minahasa Selatan menerapkan strategi <i>image marketing</i> dengan menggelar promosi investasi tahunan dan berkoordinasi dengan Bupati untuk menarik minat investor. Dalam aspek <i>attraction marketing</i> , strategi yang digunakan adalah memanfaatkan lokasi daerah serta infrastruktur yang tersedia, meskipun terdapat keterbatasan dalam hal kewenangan. Sementara dalam <i>infrastructure marketing</i> , pemerintah daerah telah melakukan pengembangan seperti pelebaran

			<i>Marketing.</i>	dan pembangunan jalan serta fasilitas pelabuhan. Pada aspek <i>people marketing</i> , DPMPTSP mengandalkan peran bupati sebagai figur utama dalam menarik investor, yang didukung dengan program promosi di luar daerah melalui kerja sama dengan berbagai pihak serta penyelenggaraan sosialisasi investasi.
9	Tamia, B., Eka, A., Yuniarsih, R.. (2021)	Menganalisis bentuk strategi yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta faktor-faktor yang memengaruhinya.	Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teori strategi menurut Porter, yaitu <i>cost leadership</i> , diferensiasi, dan fokus.	Strategi promosi, penegakan sanksi terhadap pemegang izin, dan penyediaan lahan investasi di Kota Pontianak masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan baru yang mencakup pengetatan aturan terkait sanksi, penambahan jumlah pegawai, serta pengembangan lebih lanjut terhadap investasi yang telah ada. Dengan adanya perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, diharapkan realisasi investasi di Kota Pontianak dapat meningkat secara signifikan.
10	Fadhilla, P. A. (2023)	Mengkaji strategi yang diterapkan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan investasi serta meninjau strategi tersebut dari perspektif Islam.	Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teori strategi promosi dan strategi inovasi pelayanan publik	DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan dua strategi utama dalam meningkatkan investasi, yaitu strategi promosi dan inovasi pelayanan publik. Dari perspektif Islam, kedua strategi ini diperbolehkan karena tidak mengandung unsur penipuan maupun kecurangan. Selain itu, strategi ini juga bermanfaat bagi investor serta pelaku usaha, terutama dalam hal kemudahan perizinan dan akses informasi terkait investasi.

Sumber : Diolah oleh penulis

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang dan kemudian menjadi bahan referensi dalam pembuatan penelitian ini, guna membandingkan realita yang terjadi terhadap teori dan konsep yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Soenarko (2024) yang berjudul “Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Pengelolaan Investasi Di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah” (2024). Penelitian ini berusaha untuk menganalisis strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam Pengelolaan Investasi Di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori SWOT dari Rangkuti untuk melakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi prioritas strategi (*Strength-Opportunities*) memiliki bobot tertinggi dengan nilai 3,46 dan diikuti oleh strategi (*Weakness-Threat*) dengan nilai 3,26, ketiga ada (*Strength-Threat*) memiliki nilai bobot 3,08 dan terakhir ada strategi (*Weakness-Opportunities*) dengan nilai 2,70. Strategi DPMPTSP dalam pengelolaan investasi di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah memiliki kekuatan dan Peluang yang lebih besar.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Setyaji (2023) yang berusaha untuk menganalisis penerapan konsep *pentahelix* dalam mengoptimalkan investasi di kawasan aerotropolis Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini berfokus pada identifikasi serta analisis faktor-faktor yang menghambat penerapan konsep *pentahelix* dalam upaya mengoptimalkan penanaman modal (investasi) di

kawasan tersebut. Teori yang digunakan adalah *Collaborative Governance* oleh Ansell & Gash dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep *pentahelix* dalam proses kolaborasi untuk optimalisasi investasi di Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Namun, sejak awal proses kolaborasi, tidak terdapat komitmen resmi yang disepakati oleh para pemangku kepentingan.

Sementara pada penelitian lain yang dilakukan oleh Agustin (2022) yang berusaha untuk menganalisis strategi DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Pematang. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teori strategi promosi dan strategi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan investasi, yaitu dengan cara melalui promosi langsung dan melalui web serta mengikuti *workshop* investasi.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Huda (2021) yang juga berkaitan dengan strategi meningkatkan iklim investasi daerah. Pada penelitian ini dilakukan analisis strategi DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Palangka Raya termasuk faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan teori strategi pemasaran menurut Muhammad Syakir Sula dan teori faktor pendukung dan penghambat investasi menurut Eko Prasetyo. Penelitian ini memberikan kontribusi terkait strategi yang diterapkan oleh DPMPTSP, salah satunya, yaitu dengan peluncuran OSS sebagai inovasi dalam manajemen perizinan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Bakri et al. (2022) memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan serta strategis dalam meningkatkan investasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan analisis SWOT. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data SWOT oleh David serta teori yang dikemukakan oleh Bryson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki faktor kekuatan dan ancaman yang lebih dominan dibandingkan kelemahan dan peluang. Berdasarkan temuan tersebut, strategi yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan investasi adalah dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki guna mengatasi berbagai ancaman yang ada.

Sejalan dengan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Ananda dan Ardiansyah (2024) yang memiliki tujuan untuk menganalisis strategi DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di sektor pariwisata pada Kabupaten Way Kanan dan aspek penghambat serta pendorongnya. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan teori perencanaan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi menurut Fred David. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP memiliki strategi yang efektif dalam mendorong investasi di sektor pariwisata. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan APBD. Dalam pelaksanaan strategi, hambatan yang dihadapi mencakup regulasi perizinan yang sering mengalami perubahan, sistem OSS yang masih dalam tahap pengembangan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Sementara itu, dalam evaluasi strategi, ditemukan bahwa

program-program DPMPTSP Kabupaten Way Kanan belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat, terutama para pelaku usaha, serta masih adanya keterbatasan infrastruktur publik yang menghambat perkembangan investasi.

Penelitian lain yang dilakukan Regiyati & Rusli (2021) yang menganalisis strategi dan kendala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan investasi di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian, yaitu kualitatif dengan teori strategi menurut Anatan dan Ellitan, yaitu strategi teknologi, strategi, inovasi, dan strategi operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi DPMPTSP Kota Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal karena terkendala pandemi Covid-19 sehingga kegiatan terhenti sementara, namun investasi terus meningkat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Polii et al. (2021) berusaha menganalisis strategi DPMPTSP dalam mempromosikan potensi investasi di Kabupaten Minahasa Selatan, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan teori praktek strategi untuk menarik investasi, orang, dan industri ke suatu daerah menurut Kuncoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek *image marketing*, DPMPTSP Kabupaten Minahasa Selatan menerapkan strategi promosi investasi secara aktif dengan mengadakan kegiatan promosi setiap tahun. Selain itu, koordinasi dengan bupati juga dilakukan untuk mendukung upaya menarik minat investor, termasuk melalui promosi langsung

kepada calon investor guna memperkenalkan potensi daerah. Dalam aspek *attraction marketing*, strategi yang diterapkan mengandalkan posisi geografis daerah serta infrastruktur yang telah tersedia, meskipun masih menghadapi keterbatasan kewenangan. Pada aspek *infrastructure marketing*, daerah ini telah memiliki berbagai fasilitas seperti pelebaran jalan, penambahan jalan, serta keberadaan pelabuhan untuk mendukung investasi. Sementara itu, dalam aspek *people marketing*, Kabupaten Minahasa Selatan mengandalkan peran bupati dalam menarik minat investor melalui berbagai program, termasuk promosi di luar daerah yang dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Sementara pada penelitian lain yang dilakukan oleh Tamia et al. (2021) yang berusaha menganalisis bentuk strategi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Pontianak dalam meningkatkan iklim investasi serta faktor-faktor yang memengaruhi. Jenis penelitian kualitatif dengan teori strategi menurut Porter, yaitu *cost leadership*, diferensiasi, dan fokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi, fokus, serta penegakan sanksi terhadap pemegang izin masih belum optimal, ditambah dengan keterbatasan lahan yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan baru terkait penegakan sanksi, penambahan jumlah pegawai, serta pengembangan investasi yang telah berjalan.

Penelitian oleh Fadhilla (2023) bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan investasi, serta mengevaluasi strategi tersebut dari perspektif

Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teori strategi promosi dan strategi inovasi pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan dua strategi utama dalam meningkatkan investasi, yaitu strategi promosi dan strategi inovasi dalam pelayanan publik. Dari perspektif Islam, kedua strategi tersebut diperbolehkan karena tidak mengandung unsur penipuan maupun kebohongan. Selain itu, strategi ini juga bermanfaat dalam membantu investor dan pelaku usaha, baik dalam proses perizinan maupun dalam memperoleh informasi terkait penanaman modal.

Beberapa hasil kajian penelitian terdahulu memuat kegiatan menganalisis strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hubungannya dengan peningkatan investasi di masing-masing daerah. Penelitian-penelitian tersebut sebagian besar menggunakan metode penelitian kualitatif dan sejumlah pendekatan dengan berbagai macam teori dan indikator yang digunakan dari para pendapat ahli yang berbeda sehingga dalam menganalisis strategi terdapat indikator atau fenomena yang beragam.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah sama berfokus dalam menganalisis strategi meningkatkan iklim investasi daerah oleh DPMPTSP dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian. Kemudian dalam hal teori yang digunakan, penelitian ini memiliki kesamaan seperti pada penelitian oleh Putra & Soenarko (2024) dan Bakri et al. (2022) dengan teori

yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Analisis SWOT, tetapi penelitian ini juga memiliki perbedaan teori yang digunakan oleh penelitian terdahulu lainnya seperti penelitian oleh Setyaji (2023) yang menggunakan teori *Collaborative Governance*; Agustin (2022) dengan teori strategi promosi dan strategi teknologi informasi; penelitian oleh Huda (2021) yang menggunakan teori strategi pemasaran; Ananda & Ardiansyah (2024) dengan teorinya, yaitu perencanaan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi; penelitian Regiyati & Rusli (2021) menggunakan teori strategi menurut Anatan dan Ellitan; penelitian oleh Polii et al. (2021) dengan teori *Image Marketing, Attraction Marketing, Infrastructure Marketing*; Tamia et al. (2021) dengan teori strategi menurut Porter, yaitu *cost leadership*, diferensiasi, dan fokus; dan penelitian oleh Fadhilla (2023) dengan teorinya, yaitu strategi promosi dan strategi inovasi pelayanan publik.

Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah penelitian ini memiliki lokus yang berbeda. Penelitian ini menganalisis strategi meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Purworejo dengan lokus penelitiannya adalah di DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Dalam hal teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan teori teori perencanaan strategis yang dikemukakan oleh John. M. Bryson yang kemudian dianalisis menggunakan Analisis SWOT dan Tes Litmus guna merumuskan strategi yang tepat. Berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Putra & Soenarko (2024) dan Bakri et al. (2022) yang hanya menggunakan Analisis SWOT.

1.6.2 Administrasi Publik

Pengertian administrasi publik oleh Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014) adalah suatu proses mengelola dan mengkoordinasi sumber daya dan personil publik guna merumuskan, menerapkan dan mengelola keputusan-keputusan kebijakan publik. Beberapa pengertian Administrasi Publik menurut para ahli (dalam Keban, 2014) adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Dimock, Dimock, & Fox, yang memaparkan bahwa administrasi publik adalah dinamika terencana dalam menghasilkan barang dan jasa agar kebutuhan konsumen (*citizen*) dapat terpenuhi. Pemaknaan tersebut mengarahkan pada administrasi publik sebagai aktivitas privat
- b. Barton & Chappel melihat administrasi publik sebagai *the work of government* atau pekerjaan pemerintahan yang berhubungan dengan kinerja pegawai pemerintah khususnya dalam pelayanan publik.
- c. Starling memandang administrasi publik sebagai segala hal yang dicapai pemerintah atau dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan.
- d. Nigro & Nigro memaparkan bahwa administrasi publik merupakan aktivitas kemitraan kolektif berskala publik yang terbagi dalam area eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta berperan kuat dalam merumuskan kebijakan baik secara teknokratis maupun politis. Dengan demikian, administrasi publik memiliki mekanisme dan metode yang berbeda dengan sektor privat, meskipun dalam prosesnya masih berkaitan dengan privat dan individu dalam menawarkan produk pelayanan publiknya.

Berdasarkan definisi-definisi di atas pada dasarnya administrasi publik merupakan konseptualisasi yang luas dan beberapa hakikat penting dari istilah administrasi publik mencakup:

1. Administrasi publik sebagai bidang yang kental dengan aspek eksekutif, meskipun juga berhubungan dengan aspek yudikatif dan legislatif;
2. Administrasi publik berkaitan dengan proses perumusan dan implementasi produk kebijakan publik;
3. Administrasi publik menjadi lingkup yang terkoneksi dengan varietas masalah manusiawi dan praktik kerjasama sesuai dengan tugas-tugas pemerintah;
4. Meskipun administrasi publik berbeda dengan bisnis, tetapi administrasi publik *overlapping* dengan administrasi bisnis;
5. Administrasi publik ditujukan untuk melahirkan barang dan jasa publik;
6. Administrasi publik memiliki dimensi teoritis dan praktis.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan ilmu pengetahuan yang dinamis dan telah mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Paradigma Administrasi Publik menurut Nugroho (2018) sebagai berikut:

a. *Old Public Administration (OPA)*

Paradigma Administrasi Negara Lama atau Klasik, merupakan awal perkembangan ilmu administrasi negara. Tokoh utamanya adalah Woodrow

dan F.W. Taylor Paradigma pertama, Dikotomi Politik-Administrasi menempatkan administrasi negara sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, namun menimbulkan perdebatan akademis. Paradigma kedua, Prinsip-Prinsip Administrasi Negara menekankan peran manajemen dalam administrasi negara dengan pengaruh dari bidang industri dan pemerintahan. Puncaknya terjadi pada 1937 dengan konsep POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) yang diperkenalkan oleh Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick.

b. *New Public Administration (NPA)*

Paradigma ketiga menekankan hubungan administrasi negara dengan ilmu politik. Tokohnya adalah Herbert Simon yang memperkenalkan konsep *Pure Rationality* dan *Bounded Rationality* dalam pengambilan keputusan organisasi. Namun, sejak 1962, administrasi negara mulai dipisahkan dari ilmu politik, meskipun tetap berfokus pada birokrasi pemerintahan. Akibatnya, terjadi krisis identitas karena dominasi ilmu politik dalam administrasi publik. Paradigma keempat menempatkan administrasi negara sebagai ilmu administrasi dengan pendekatan ilmiah terhadap manajemen, perilaku organisasi, dan teknologi modern. Fokusnya terbagi menjadi administrasi murni berbasis psikologi sosial dan administrasi yang menelaah kebijakan publik. Paradigma kelima menegaskan administrasi negara sebagai disiplin ilmu tersendiri, tidak hanya berfokus pada birokrasi tetapi juga teori organisasi, perilaku individu, dan proses pengambilan keputusan. Ilmu kebijakan, politik ekonomi, serta analisis kebijakan juga berkembang.

c. *New Public Management (NPM)*

Kritik terhadap teori administrasi klasik dan neoklasik mendorong pembaharuan dalam administrasi publik, melahirkan konsep *New Public Management* (NPM). Konsep ini bertujuan mentransformasi prinsip bisnis dan sektor privat ke dalam sektor publik dengan pendekatan efisiensi dan efektivitas, sebagaimana slogan "*run government like business*". Tokoh paradigma ini adalah David Osborne dan Ted Gaebler yang memperkenalkan konsep ini dalam *Reinventing Government* dan *Banishing Bureaucracy*. NPM mengadopsi semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*) dalam birokrasi untuk meningkatkan produktivitas pemerintah.

d. *New Public Services (NPS)*

Paradigma *New Public Service* (NPS) dikembangkan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt dalam buku *The New Public Service: Serving, not Steering*. NPS menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, warga negara bukan sekadar pelanggan (*customers*), tetapi pemilik (*owners*) dari pemerintahan yang memberikan layanan publik. Dalam *New Public Service* (NPS), Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt memperkenalkan tujuh prinsip utama sebagai dasar paradigma ini, yaitu :

- Melayani warga, bukan pelanggan
- Menciptakan kepentingan publik secara kolektif
- Mengutamakan nilai-nilai kewarganegaraan
- Berpikir strategis, bertindak demokratis

- Melayani, bukan mengarahkan
- Akuntabilitas bukan hanya kepada pasar, tetapi kepada hukum, nilai, dan norma demokrasi
- Melayani dengan rasa hormat, integritas, dan tanggung jawab publik

Paradigma ini sesuai dengan penelitian ini karena *New Public Service* dalam hal ini paradigma *New Public Service* (NPS) menekankan pelayanan publik yang lebih berfokus pada pelayanan warga negara dan kolaborasi dibandingkan sekadar efisiensi administratif atau kontrol pasar. Paradigma ini mengutamakan partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi, serta orientasi pada kepentingan bersama. Penerapan paradigma *New Public Service* dalam strategi DPMPSTSP Kabupaten Purworejo berpotensi meningkatkan iklim investasi daerah dengan memastikan bahwa proses perizinan dan pelayanan publik dilakukan secara inklusif, transparan, dan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini akan membangun kepercayaan dan daya tarik investasi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di masyarakat.

1.6.4 Manajemen Publik

Secara etimologis, manajemen publik terdiri dari dua kata, yaitu "manajemen" dan "publik". Menurut Stoner (dalam Satibi, I., 2012), "manajemen" adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa manajemen mencakup pengelolaan organisasi secara menyeluruh, termasuk perencanaan, pengorganisasian,

pengendalian, serta pemanfaatan sumber daya. Sementara itu, istilah “publik” memiliki makna yang beragam tergantung pada konteks penggunaannya. Secara sosiologis, publik dapat merujuk pada masyarakat yang hidup bersama dalam suatu sistem sosial, terikat oleh norma dan nilai tertentu. Secara umum, publik dapat diartikan sebagai masyarakat luas atau rakyat.

Berdasarkan konsep tersebut, Satibi, I. (2012) mendefinisikan manajemen publik sebagai pengelolaan sektor publik oleh institusi pemerintah, mencakup perencanaan, strategi, pengendalian, evaluasi, serta pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, dan teknologi guna mencapai tujuan organisasi. Istilah manajemen publik berkembang dari teori *New Public Management* (NPM) dan kemudian bergeser ke konsep *New Public Service* (NPS). Fokus utama manajemen publik adalah memastikan pengelolaan sektor publik dilakukan secara profesional dan proporsional dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Tujuannya tidak hanya sekedar memenuhi prosedur dan regulasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1.6.5 Investasi

Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan, baik melalui kenaikan nilai aset (*capital gain*) maupun pendapatan pasif seperti dividen atau bunga. Mankiw (dalam Isyahnuni, 2023) mendefinisikan investasi sebagai pembelian barang dan jasa, seperti peralatan dan struktur, yang akan digunakan untuk meningkatkan produksi di masa mendatang.

Investasi berperan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang yang masih bergantung pada modal asing (Arli, 2018). Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi juga meningkatkan permintaan tenaga kerja sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Dalam teori ekonomi, investasi merupakan pengeluaran pemerintah untuk barang modal guna meningkatkan produksi barang dan jasa di masa depan. Sebagai bagian dari komponen GDP ($C + I + G + (X-M)$), investasi memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun panjang (Isyahnuni, 2023). Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap investasi antara lain:

1. Pendapatan Nasional, peningkatan daya beli masyarakat yang tercermin dari kenaikan pendapatan nasional per kapita (diukur melalui GNP atau GDP) akan menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modal.
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana, infrastruktur yang memadai, seperti transportasi, telekomunikasi, dan sistem pengelolaan limbah, menjadi faktor pendukung investasi yang penting.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tenaga kerja yang kompeten dan memiliki keterampilan yang baik akan meningkatkan daya tarik suatu negara bagi investor.
4. Suku Bunga, suku bunga yang rendah mendorong investor untuk meminjam modal guna berinvestasi, sedangkan suku bunga tinggi dapat menghambat minat investasi.

5. Kebijakan Pemerintah, kejelasan regulasi terkait investasi, ketenagakerjaan, dan kontrak kerja dapat meningkatkan kepercayaan investor.
6. Stabilitas Politik dan Keamanan, lingkungan politik yang stabil dan aman menjadi faktor penting dalam menjaga investasi jangka panjang.
7. Faktor Sosial dan Budaya, investor perlu mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat sebelum berinvestasi karena preferensi pasar dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya setempat.

Menurut Pasaribu (dalam Tamia et al., 2021), Investasi berasal dari dua sumber, yaitu sebagai berikut :

1) Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 9 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing (PMA) merujuk pada kegiatan investasi yang dilakukan oleh pihak asing untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Investasi ini dapat dilakukan secara penuh oleh investor asing atau melalui kemitraan dengan investor domestik.

Menurut Dayanti (dalam Isyahnuni, 2023), PMA merupakan aliran modal dari luar negeri yang masuk ke sektor swasta melalui dua bentuk utama, yaitu penanaman modal langsung (*direct investment*) dan penanaman modal tidak langsung (*portofolio investment*). Penanaman modal langsung terjadi ketika investor asing terlibat secara aktif dalam operasional bisnis sehingga mereka memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Sebaliknya, investasi portofolio adalah bentuk investasi di mana investor asing membeli saham atau obligasi tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan bisnis, dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial. Contoh umum dari investasi ini adalah pembelian saham domestik oleh individu atau perusahaan asing.

Menurut Dumairy (dalam Isyahnuni, 2023), regulasi mengenai PMA di Indonesia awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967, yang memberikan berbagai insentif dan perlindungan bagi investor asing. Beberapa poin utama dalam regulasi ini meliputi:

- a. Insentif Pajak, investor asing dibebaskan dari pajak dividen dan pajak perusahaan selama lima tahun pertama. Setelah itu, mereka mendapatkan keringanan pajak lebih dari 50% dalam lima tahun berikutnya. Selain itu, mereka diizinkan untuk menutup kerugian perusahaan setelah masa tax holiday dan dibebaskan dari bea impor atas mesin, perlengkapan, serta bahan baku.
- b. Jaminan terhadap Nasionalisasi, pemerintah menjamin bahwa perusahaan asing tidak akan dinasionalisasi. Jika terjadi nasionalisasi, investor akan diberikan kompensasi yang sesuai.
- c. Jangka Waktu Operasional, masa operasional PMA ditetapkan selama 30 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan hasil negosiasi ulang antara investor dan pemerintah.
- d. Kebebasan Manajemen dan Tenaga Kerja, investor asing diperbolehkan membawa serta memilih personel manajemennya sendiri, serta dapat

mempekerjakan tenaga ahli asing jika tenaga kerja lokal belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

- e. Kebebasan Transfer Dana, investor asing diizinkan untuk mentransfer keuntungan dalam bentuk valuta asing, termasuk dana penyusutan yang diperoleh dari penjualan saham kepada investor Indonesia.
- f. Sektor yang Dibatasi untuk Modal Asing, beberapa sektor usaha tidak terbuka bagi investor asing, antara lain infrastruktur publik, media massa, transportasi, serta industri yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara..

2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, mencakup hak dan tujuan individu serta badan usaha yang menetap di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan PMDN sebagai kegiatan investasi yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dari sumber dalam negeri, untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan PMDN harus mendapat persetujuan dari pemerintah dan dapat berbentuk investasi baru, ekspansi usaha, atau perubahan status investasi, baik dalam bentuk pinjaman maupun modal pribadi. Regulasi mengenai PMDN diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007, serta sebelumnya telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 1968 dan UU No. 12 Tahun 1970.

Menurut Fahmi (dalam Isyahnuni, 2023), pembentukan UU No. 6 Tahun 1968 mengenai PMDN didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, yaitu:

- a. Peran Modal dalam Pembangunan: Sebagai faktor penting dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Pemanfaatan Maksimal Modal Dalam Negeri: Modal dalam negeri harus dimanfaatkan secara optimal untuk rehabilitasi, pembaruan, ekspansi, serta pembangunan baru dalam sektor produksi barang dan jasa.
- c. Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif: Pemerintah perlu menetapkan regulasi dan insentif untuk mendorong investasi dalam negeri.
- d. Kesempatan bagi Sektor Swasta: Dalam sistem ekonomi nasional yang adil berdasarkan Pancasila, sektor swasta memiliki peluang luas untuk berusaha, kecuali di sektor-sektor yang telah ditetapkan sebagai kewenangan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Kemandirian Ekonomi Nasional: Pembangunan ekonomi harus bertumpu pada kemampuan dan potensi masyarakat Indonesia sendiri.
- f. Pemanfaatan Modal Asing Domestik: Dalam kondisi tertentu, modal dalam negeri yang dimiliki oleh pihak asing dapat dimanfaatkan, asalkan tidak merugikan pertumbuhan ekonomi dan pengusaha nasional.
- g. Pemberian Insentif: Untuk mendorong investasi dalam negeri, pemerintah memberikan berbagai fasilitas dan regulasi yang menguntungkan investor domestik.

Sesuai dengan Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2007, pihak-pihak yang dapat melakukan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meliputi:

- a. Individu yang merupakan warga negara Indonesia.
- b. Badan Usaha Indonesia yang didirikan di wilayah Indonesia.
- c. Badan Hukum Indonesia yang memiliki legalitas

1.6.6 Manajemen Strategis

Manajemen strategis adalah sebuah konsep yang menggabungkan "*manajemen*" serta "*strategi*". Manajemen sendiri didefinisikan sebagai proses mobilisasi individu serta non-manusia guna meraih tujuan organisasi. Strategi mengacu pada kiat, metode, serta taktik yang dikembangkan dengan sistematis pada saat pelaksanaan fungsi manajemen untuk meraih tujuan organisasi dengan efisien serta efektif. Nawawi (dalam Ginting et al., 2024) merangkum manajemen strategis menjadi beberapa ciri:

- Manajemen strategis dibuat sebagai rencana besar dalam suatu organisasi, dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) dan perencanaan operasional (Renop), serta dilakukan pembagian ke dalam masing-masing program kerja.
- Rencana strategis (Renstra) pada sektor nirlaba (pemerintah) mempunyai kurun waktu 25-30 tahun sebagai perencanaan jangka panjang, sedangkan rencana operasional (Renop) dipergunakan untuk 5 tahun disebut pula perencanaan pembangunan lima tahun (Repelita) sebagai

perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek dikerjakan pada APBN yang menjadi rencana serta program tahunan.

- Visi, misi, dan tujuan berguna pada pembuatan perencanaan strategis.
- Rencana strategis mencakup program dengan tujuan jangka menengah.
- Guna melakukan pertahanan serta perkembangan bisnis dalam jangka menengah serta panjang, manajemen strategis memainkan peran penting dalam Renstra dan Renop.
- Saat melaksanakan Renstra serta Renop, harus menjalankan fungsi manajemen, yakni pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, serta evaluasi.

Oleh karena itu, manajemen strategis yakni memiliki fungsi manajemen menghilangkan ketidakpastian pada proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dengan mempergunakan seluruh sumber daya yang tersedia secara praktis untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif serta efisien.

1.6.7 Perencanaan Strategis

Dalam penelitian ini adapun peneliti menggunakan perencanaan strategis yang dikemukakan oleh Bryson (2016). Model perencanaan dan manajemen strategi ini yang dalam suatu organisasi menyajikan suatu sudut pandang yang lebih beraneka ragam. Di mana titik awal model perencanaan Bryson ini muncul akibat adanya perbedaan antara rasionalitas politik dengan rasionalitas ekonomi neoklasik (Bryson, 2016). Selain itu, beliau juga mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mencegah terjadinya

perubahan dalam suatu organisasi yang mencakup:

1. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis

Bertujuan untuk melakukan negosiasi kesepakatan dengan pembuat keputusan atau pembuat opini baik internal maupun eksternal mengenai segala upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan. Dalam kesepakatan ini harus meliputi tujuan perencanaan; langkah-langkah dalam proses; bentuk dan jadwal pembuat laporan; peran, fungsi, dan anggota perencana strategis; serta komitmen

2. Memperjelas mandat organisasi

Mandat dalam suatu organisasi merupakan suatu ketetapan dalam legislasi atau UU yang menjadi dasar yuridis dalam keberadaan suatu organisasi publik. Dalam suatu perencanaan strategis memahami mandat diperlukan guna menghindari terjadinya penyimpangan.

3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi

Misi dalam suatu organisasi merupakan pernyataan yang berisi mengenai tujuan organisasi kedepannya dan memiliki kegunaan dalam memberikan alasan mengenai dibentuknya suatu organisasi dan juga tujuan yang ingin diwujudkan. Sementara nilai-nilai organisasi berkaitan dengan suatu hal yang dapat diukur yang dapat berisikan kebaikan ataupun kebenaran mengenai perilaku dalam organisasi sebagai budaya kerja yang penting diterapkan guna pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan organisasi.

4. Identifikasi lingkungan internal

Lingkungan internal berisikan mengenai unsur-unsur di dalam organisasi yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh manajer dalam suatu organisasi. Analisis terhadap lingkungan internal ini juga berkaitan dengan peluang beserta dengan ancaman yang dimiliki dan yang harus dihadapi dalam keberjalanan program yang dimiliki oleh suatu organisasi. Adapun analisis internal meliputi:

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi manusiawi yang berada pada diri seseorang yang dapat berupa potensi fisik ataupun non fisik. Sumber daya manusia dapat berupa 2 aspek yang meliputi aspek kualitas yang dapat berupa kemampuan baik fisik maupun nonfisik (*skill*, pengalaman, kecerdasan, mental, dll) dan aspek kuantitas yang dapat berupa jumlah ketersediaan SDM pendukung keberhasilan pengembangan organisasi.

b. Dana/Anggaran

Anggaran merupakan sebuah rencana yang telah dibuat dengan sistematis yang berupa keseluruhan rangkaian kegiatan dari suatu organisasi yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan memiliki jangka waktu periode tertentu yang akan datang.

Lebih lanjut, Keban (2014) juga menyatakan bahwa ketersediaan anggaran penting guna mendukung tugas serta fungsi dari organisasi

dengan memanfaatkannya secara efisien. Dana/anggaran penting ketersediaannya salah satu syarat mutlak dalam menjalankan berbagai program dan aktivitas organisasi.

c. Sarana Prasarana

Sarana dan fasilitas memiliki peran krusial dalam suatu organisasi karena berfungsi sebagai pendukung utama dalam memperlancar berbagai aktivitas. Jika sarana dan prasarana tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas yang memadai, organisasi akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya.

5. Identifikasi lingkungan eksternal

Lingkungan eksternal berisikan mengenai unsur-unsur di luar organisasi yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh manajer dalam suatu organisasi. Penilaian lingkungan eksternal juga berkaitan dengan melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan serta aspek-aspek yang dapat membantu atau menghalangi pelaksanaan dalam mencapai misi dan mandat organisasi. Adapun penilaian lingkungan eksternal dapat dilakukan pada:

a. Aspek politik

Dalam implementasi manajemen strategis, perubahan regulasi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, harus diperhatikan karena dapat memengaruhi ruang lingkup dan misi organisasi. Situasi politik yang berubah juga dapat berdampak pada kelangsungan

organisasi sehingga pemantauan dan penyesuaian kebijakan dengan kondisi politik yang berkembang menjadi suatu keharusan.

b. Aspek ekonomi

Organisasi perlu memperhatikan tren ekonomi yang berhubungan dengan karakteristik dan arah sistem ekonomi tempat mereka beroperasi. Pemahaman terhadap perkembangan ekonomi di lingkungan organisasi sangat penting. Tanpa analisis ekonomi yang memadai, organisasi akan kesulitan merancang strategi yang tepat.

c. Aspek sosial

Faktor sosial yang berpengaruh terhadap organisasi, yaitu mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan gaya hidup masyarakat. Aspek keberagaman suku, ras, agama, pertumbuhan populasi, dan tingkat pendidikan masyarakat yang perlu disoroti dalam aspek ini. Faktor-faktor sosial ini memiliki dampak signifikan terhadap pengambilan keputusan organisasi, terutama terkait dengan peran pendidikan dan keberadaan institusi akademik sebagai mitra strategis.

d. Aspek teknologi

Perkembangan teknologi perlu dicermati oleh organisasi untuk menghindari ketertinggalan dan meningkatkan efisiensi. Adaptasi terhadap teknologi dapat mendukung inovasi produk serta meningkatkan prosedur pelayanan. Dalam konteks ini, teknologi mencakup sistem komunikasi, infrastruktur transportasi, serta penerapan teknologi informasi yang dapat mendukung perumusan

kebijakan dan strategi organisasi secara lebih efektif.

e. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi lebih dari sumbangan tenaga, waktu, dan sumber daya materi secara sukarela guna memberikan dukungan atas program dan kegiatan pembangunan, tetapi juga dalam keterlibatan secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan.

f. Keterlibatan *Stakeholders*

Stakeholder merupakan beberapa kelompok atau individu yang memiliki pengaruh atau dipengaruhi oleh adanya capaian dari keberjalanan tujuan suatu organisasi.

6. Identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi

Menurut Thomas E. Ambler (dalam Anggraini et al., 2023) Isu Strategis merupakan aspek terpenting yang membutuhkan perhatian guna mencapai tujuan bisnis pada sebuah organisasi atau perusahaan. Sementara Jane Dutton mendefinisikan isu strategis sebagai suatu pengembangan, peristiwa-peristiwa, dan tren-tren yang mempunyai potensi yang memiliki dampak terhadap strategi pada suatu organisasi.

7. Perumusan strategi untuk mengelola isu strategis

Perumusan strategi dilakukan setelah seluruh elemen organisasi menyepakati isu strategis. Dalam proses ini, anggota organisasi bertanggung jawab merancang strategi yang efektif untuk mengatasi berbagai isu strategis yang telah diidentifikasi.

8. Penetapan visi organisasi yang efektif dan efisien

Fred R. David (dalam Anggraini et al., 2023) mendefinisikan visi sebagai bentuk pernyataan yang berisikan jawaban dan penggambaran tentang suatu kondisi ataupun citra suatu organisasi yang ingin dicapai pada masa depannya. Fred R. David juga mendefinisikan misi sebagai tatanan rencana pokok yang mendeskripsikan alasan bagi suatu organisasi untuk membuat dan mengarahkannya pada isu yang menjadi fokus organisasi tersebut. Visi merupakan serangkaian kata yang menggambarkan impian, cita-cita, atau nilai inti suatu organisasi. Visi juga dapat diartikan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh organisasi atau lembaga di masa depan. Visi juga dapat berisikan pemikiran dari ketua atau pendiri dari suatu organisasi. Penetapan visi dalam suatu organisasi berkaitan erat dengan bagaimana suatu organisasi berjalan dan menjabarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya.

Untuk membahas penelitian ini berjudul “Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Daerah” dipakai empat dari delapan tahap perumusan strategis, yaitu:

- a. Identifikasi Visi Misi Organisasi
- b. Identifikasi lingkungan internal
- c. Identifikasi lingkungan eksternal
- d. Identifikasi isu strategis
- e. Perumusan strategi untuk mengelola isu

Untuk melakukan analisis lingkungan strategis dilakukan melalui penganalisaan SWOT. Alat untuk melakukan analisis SWOT dapat dipakai sebagai alat guna dilakukan analisis situasi lingkungan internal serta eksternal. Lingkungan internal dan eksternal.

1.6.8 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu usaha atau bisnis. Melalui identifikasi sistematis terhadap berbagai faktor ini, strategi dapat dirumuskan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang secara optimal, sekaligus mengurangi kelemahan dan menghadapi ancaman dengan lebih efektif. Dengan demikian, analisis SWOT memungkinkan perbandingan antara faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman, dengan faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, dalam kondisi saat ini. Menurut Rangkuti (dalam Pertiwi, 2020), analisis SWOT dapat didefinisikan sebagai :

1) *Strength* (Kekuatan)

Kekuatan mengacu pada kondisi atau situasi yang menjadi keunggulan suatu organisasi pada saat ini. Faktor ini bersifat internal dan berperan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Kekuatan dapat berupa sumber daya yang tersedia, keahlian, atau keunggulan lain seperti stabilitas keuangan, citra perusahaan yang baik, dominasi pasar, serta hubungan yang harmonis dengan pelanggan dan pemasok.

2) *Weakness* (Kelemahan)

Kelemahan merupakan aspek-aspek dalam organisasi yang tidak berjalan optimal atau keterbatasan sumber daya yang menghambat pencapaian tujuan. Faktor ini bersifat internal dan sering kali lebih mudah diidentifikasi dibandingkan kekuatan. Namun, tanpa strategi yang tepat, kelemahan tersebut dapat terus menghambat pertumbuhan organisasi. Contoh faktor kelemahan meliputi keterbatasan fasilitas, kurangnya sumber daya keuangan, manajemen yang kurang efektif, lemahnya strategi pemasaran, serta citra perusahaan yang kurang baik.

3) *Opportunities* (Peluang)

Peluang adalah faktor eksternal yang dapat memberikan keuntungan bagi organisasi jika dimanfaatkan dengan baik. Peluang tidak hanya berupa kebijakan yang mendukung atau ketersediaan modal, tetapi juga bisa berupa tren sosial yang menguntungkan atau isu yang berkembang di masyarakat. Beberapa contoh peluang mencakup perubahan regulasi yang menguntungkan, peningkatan persaingan yang dapat dimanfaatkan, perkembangan teknologi, serta hubungan yang semakin baik antara pemasok dan pelanggan.

4) *Threat* (Ancaman)

Ancaman merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan organisasi. Sering kali, ancaman ini kurang diperhatikan karena organisasi lebih berfokus pada faktor internal. Jika tidak diantisipasi dengan baik, ancaman dapat melemahkan daya saing organisasi sebelum mencapai tahap pertumbuhan yang stabil.

Beberapa contoh ancaman meliputi munculnya pesaing baru, perlambatan pertumbuhan pasar, perkembangan teknologi yang menuntut adaptasi cepat, serta perubahan kebijakan yang merugikan.

Teknik SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) adalah metode untuk menganalisis kondisi organisasi sebagai dasar perencanaan strategi. Setelah mengidentifikasi isu yang dihadapi, perlu ada kesepakatan antar pemangku kepentingan terkait arah perubahan, elemen yang perlu ditingkatkan, dikurangi, atau diganti. Proses ini berlandaskan analisis situasi berdasarkan peta kondisi SWOT. Tujuan utama analisis SWOT adalah mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk menyusun strategi yang realistis dan efektif. Penggunaan SWOT membantu perusahaan mengenali potensi internal dan peluang eksternal, sekaligus mengantisipasi tantangan.

a. Matriks SWOT

IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*) adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor strategis internal dalam suatu organisasi. Sementara itu, EFAS (*External Strategic Factors Analysis Summary*) adalah alat analisis yang berfokus pada faktor-faktor strategis eksternal yang memengaruhi organisasi. Dengan menganalisis IFAS dan EFAS, organisasi dapat menyusun strategi yang lebih tepat guna dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Dalam analisis SWOT, IFAS dan EFAS dibandingkan untuk merumuskan alternatif strategi yang optimal.

Tabel 1. 3 Matriks SWOT

EFAS IFAS	<i>Strength</i> (Kekuatan) Tentukan faktor-faktor kekuatan internal	<i>Weakness</i> (Kelemahan) Tentukan faktor-faktor kelemahan internal
	<i>Strategi S-O</i> (<i>Agresif</i>) Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	<i>Strategi W-O</i> (<i>Turn-around</i>) Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<i>Opportunities</i> (Peluang) Tentukan faktor-faktor peluang eksternal		
<i>Threats</i> (Ancaman) Tentukan faktor-faktor ancaman eksternal	<i>Strategi S-T</i> (<i>Diversification</i>) Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	<i>Strategi W-T</i> (<i>Defensive</i>) Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Rangkuti (dalam Pertiwi, 2020)

Strategi SO diterapkan dengan memanfaatkan kekuatan internal organisasi untuk mengambil peluang eksternal secara maksimal sehingga dapat mempercepat pertumbuhan dan pengembangan. Sementara itu, strategi ST bertujuan menggunakan kekuatan internal untuk menghadapi atau mengurangi dampak ancaman dari lingkungan eksternal sehingga organisasi tetap stabil dan kompetitif. Di sisi lain, strategi WO berfokus pada pemanfaatan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan internal, misalnya dengan melakukan peningkatan kapasitas atau restrukturisasi. Terakhir, strategi WT bertujuan

untuk meminimalkan kelemahan internal sekaligus menghindari ancaman eksternal agar organisasi tidak mengalami stagnasi atau kemunduran.

1.6.9 Uji Litmus

Uji litmus berguna untuk menentukan tingkat kestrategisan dari sebuah isu yang telah didapatkan sebelumnya. Topik yang benar-benar strategis adalah isu dengan skor tertinggi di setiap dimensi, sementara isu yang benar-benar operasional adalah isu dengan skor terendah di setiap dimensi. Klasifikasi nilai dalam masing-masing jawaban dalam uji litmus adalah sebagai berikut:

- a. Isu yang bersifat Operasional: Skor 1
- b. Isu yang bersifat Moderat: Skor 2
- c. Isu yang bersifat Strategis: Skor 3

Adapun rentang skor untuk mengurutkan isu-isu tersebut:

- Rentang skor 1-13: Isu yang bersifat Operasional
- Rentang skor 14-26: isu yang bersifat Moderat
- Rentang skor 27-39: Isu yang bersifat Strategis

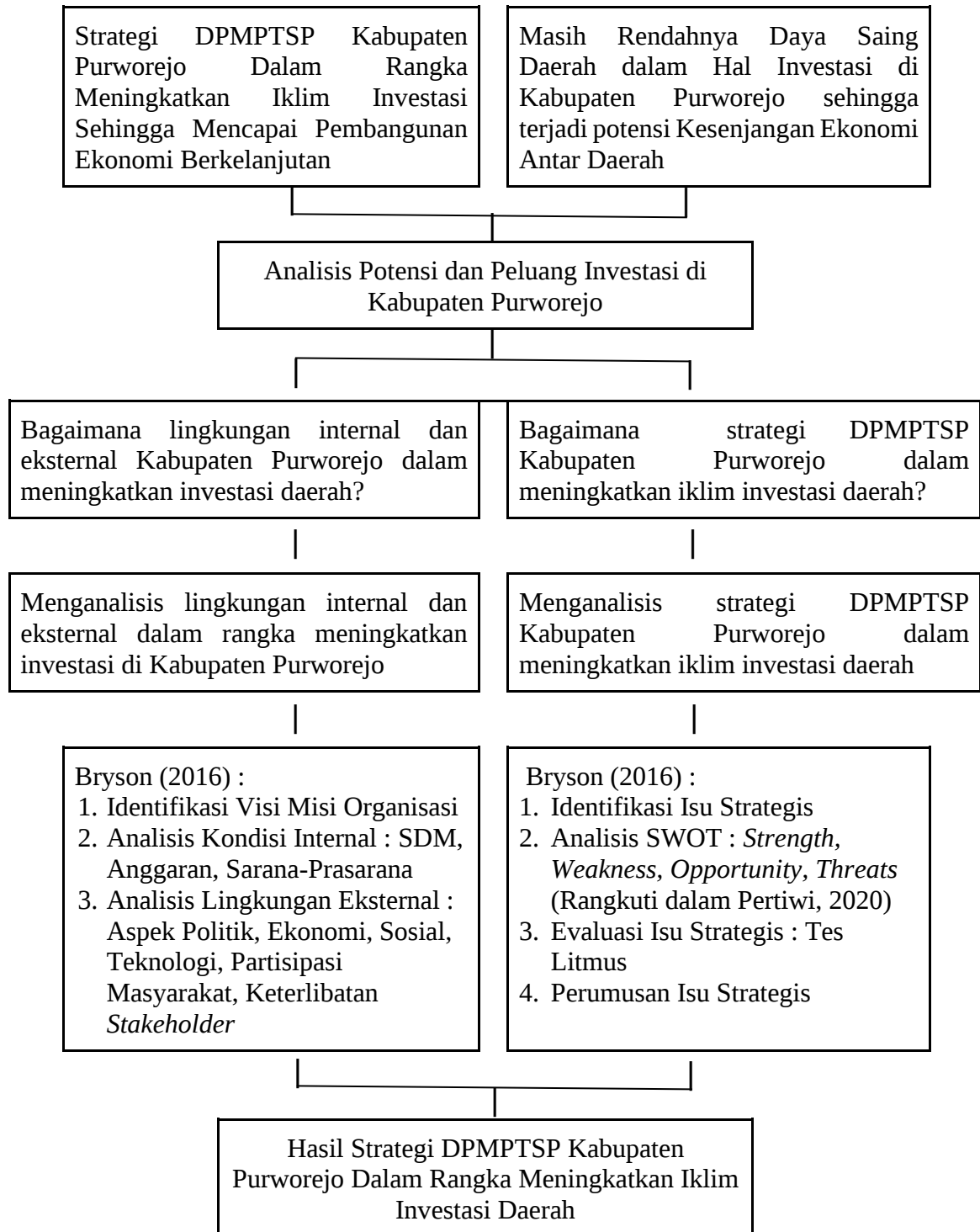
Tabel 1. 4 Tes Litmus

Pertanyaan	Operasional Strategis		
	(1)	(2)	(3)
Kapan tantangan peluang isu strategis ada dihadapan anda?	Sekarang	Tahun Depan	Dua Tahun atau lebih
Seberapa luas suatu isu akan berpengaruh pada departemen anda?	Unit/divisi tunggal	Beberapa divisi	Seluruh departemen
Seberapa banyak resiko/peluang keuangan organisasi anda?	Kecil (10% dari anggaran)	Sedang (10%-25% dari anggaran)	Besar lebih dari 25% dari anggaran)
Apakah strategi bagi pemecahan isu membutuhkan: a. Pengembangan sasaran dan program pelayanan baru? b. Perubahan signifikan dalam sumber-sumber atau jumlah pajak? c. Perubahan signifikan dalam ketetapan? peraturan? d. Penambahan atau modifikasi fasilitas? e. Penambahan staf yang signifikan?	Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak		Ya Ya Ya Ya Ya
Bagaimana pendekatan terbaik bagi pemecahan isu?	Jelas, siap diimplementasikan	Parameter luas, agak terperinci	Terbuka luas
Tingkat manajemen manakah yang dapat menetapkan bagaimana menanggulangi isu?	Pengawasan staf lini	Kepala divisi	Kepala departemen
Konsekuensi apakah yang mungkin terjadi bila isu tidak diselesaikan?	Ada gangguan, inefisiensi	Kekacauan pelayanan kehilangan sumber dana	Kekacauan pelayanan biaya besar/penghasilan turun
Seberapa banyak departemen lain dipengaruhi oleh isu ini dan harus dilibatkan dalam pemecahan?	Tidak ada	Satu sampai tiga	Empat atau lebih
Bagaimana sensitivitas isu ini terhadap nilai sosial, politik, religius dan kultural?	Lunak	Sedang	Keras

Sumber : (Bryson, 2016)

1.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 7 Bagan Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah oleh penulis

1.8 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah elemen penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memperjelas dan memfokuskan pembahasan terhadap permasalahan utama. Dalam penelitian ini, permasalahan utama yang akan dianalisis adalah strategi DPMPTSP Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan iklim investasi daerah. Melalui operasionalisasi konsep, strategi tersebut dapat dikaji secara sistematis guna memahami faktor-faktor yang berpengaruh serta langkah-langkah yang diterapkan untuk mendukung pertumbuhan investasi di daerah tersebut.

Tabel 1. 5 Operasional Konsep

Dimensi	Variabel	Indikator
Identifikasi Visi Misi Organisasi	Visi dan Misi	Kesesuaian program dengan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
		Bentuk penerapan strategi serta visi misi dan strategi peningkatan iklim investasi di Kabupaten Purworejo
Analisis Lingkungan Internal	Sumber Daya Manusia	Kualifikasi Pendidikan para pegawai di DPMPTSP Kabupaten Purworejo
		Kuantitas SDM para pegawai di DPMPTSP Kabupaten Purworejo
		Bentuk koordinasi dan kerjasama dalam upaya peningkatan iklim investasi di Kabupaten Purworejo
	Sarana prasarana	Ketersediaan infrastruktur fisik di Kabupaten Purworejo. Infrastruktur diperlukan untuk memperlancar kegiatan usaha bagi dunia usaha.
		Kualitas serta Kemudahan Aksesibilitas terhadap infrastruktur. Semakin baik kualitas dari fasilitas serta infrastruktur meningkatkan daya tarik investor
	Dana/Anggaran	Ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan Kabupaten Purworejo

		Ketersediaan dana anggaran untuk promosi potensi-potensi daerah Kabupaten Purworejo
		Ketersediaan dana anggaran untuk pelatihan SDM
Analisis Lingkungan Eksternal	Faktor Ekonomi	Potensi ekonomi, mencakup faktor-faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, menjadi pertimbangan terhadap daya tarik investasi suatu daerah
		Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi yang stabil atau meningkat menunjukkan adanya pengelolaan sumber daya yang baik
	Faktor Politik	Kondisi politik daerah yang berpengaruh dalam peningkatan iklim investasi daerah.
		Regulasi atau payung hukum yang melandasi aktivitas investasi. Fokus utama indikator yang adalah prosedur dan biaya yang diatur misalnya dalam peraturan daerah
	Faktor Sosial Budaya	Kondisi lingkungan sosial budaya yang berpengaruh terhadap daya tarik investor terhadap daerah
		Dukungan sosial budaya terhadap pengembangan dan investasi daerah Kabupaten Purworejo
	Partisipasi Masyarakat	Upaya dan Peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya peningkatan iklim investasi di Kabupaten Purworejo
	Teknologi	Kegiatan pemanfaatan teknologi dengan melakukan promosi profil dan potensi investasi daerah Kabupaten Purworejo
		kendala dalam penggunaan teknologi yang menghambat peningkatan iklim investasi di Kabupaten Purworejo
	Keterlibatan Stakeholders	Pihak yang terlibat dalam pengembangan investasi di Kabupaten Purworejo
		Bentuk kerjasama dan koordinasi antara pihak/lembaga satu dengan yang lain dalam upaya meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Purworejo

Sumber : Diolah oleh penulis

Peran dari DPMPTSP ini dapat berfungsi sebagai katalis untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investor, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik investasi daerah tersebut. Hal tersebut menjadi dasar peneliti dalam menganalisis strategi DPMPTSP Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan iklim investasi daerah. Peneliti menggunakan teori perencanaan strategis yang dikemukakan oleh Bryson dan kemudian dianalisis menggunakan Analisis SWOT sebagai dasar menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian serta rumusan masalah. Kemudian isu-isu strategis yang diperoleh akan dievaluasi menggunakan Tes Litmus guna merumuskan strategi yang tepat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi DPMPTSP Kabupaten Purworejo dalam upaya mengembangkan iklim investasi di daerah.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian mengenai riset yang cenderung menekankan pada penggunaan teknik analisis sekaligus penggambaran tentang sebuah realitas yang ada sehingga dalam penjabaran hasil penelitian banyak menggunakan kata-kata yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh. Hasil penelitian ini kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa, dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Hasil penelitian kualitatif akan semakin berkualitas apabila data yang diperoleh

sangat detail, rinci dan mendalam (Sugiyono, 2020). Data kualitatif adalah data yang dijabarkan dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana strategi DPMPTSP Kabupaten Purworejo dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian, yaitu keputusan untuk menetapkan lokasi atau area di mana penelitian akan dilakukan. Sebagai penelitian dengan metode kualitatif yang mengedepankan kealamiah situasi atau fenomena penelitian maka penelitian ini dilakukan dengan lokasi yang sangat menghindari latar (*setting*) penelitian. Penelitian dengan topik strategi DPMPTSP Kabupaten Purworejo dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah ini dilakukan di DPMPTSP Kabupaten Purworejo yang berlokasi di Jl. Proklamasi, Plaosan, Purworejo, Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pemilihan DPMPTSP Kabupaten Purworejo sebagai lokus penelitian karena Kabupaten Purworejo menjadi daerah dengan daya saing investasi yang cukup rendah di Provinsi Jawa tengah berdasarkan pada Portal Data Jawa Tengah dan pada tahun 2023.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian memiliki kaitan erat dengan berjalannya suatu penelitian karena dalam mengumpulkan data dan informasi di lapangan harus sesuai dengan fokus penelitian sehingga harus cermat dalam menentukan

subjek penelitian. Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2020), sebagai informan atau subjek penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki pemahaman atau pengalaman mendalam dalam suatu bidang melalui proses enkulturasi sehingga tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga menghayati hal tersebut.
- b. Aktif terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- c. Tersedia dalam waktu yang cukup untuk memberikan informasi yang diharapkan.
- d. Tidak memiliki kecenderungan untuk menyampaikan informasi menurut sudut pandang pribadi.
- e. Pada awalnya kurang familiar dengan peneliti sehingga memiliki potensi untuk memberikan wawasan baru atau menjadi sumber informan yang berharga.

Dalam penelitian ini, pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* karena penentuan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan maksud atau tujuan penelitian. Alasan menggunakan teknik ini, yaitu karena tidak semua subjek memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Informan untuk penelitian ini, yaitu Sekretaris DPMPTSP Purworejo, Analis Investasi dan Permodalan Usaha, Pengelola Kerjasama Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Purworejo, serta dari Bidang Data dan Sistem Informasi DPMPTSP Kabupaten Purworejo.

1.9.4 Jenis Data

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yang berarti data dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian di lokasi yang menjadi fokus kajian. Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif dalam bentuk narasi berdasarkan kata-kata tertulis maupun hasil observasi langsung tentang gejala yang sedang diselidiki.

Sehubungan dengan hal tersebut, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks, tulisan, frasa atau simbol yang dapat menggambarkan orang-orang dalam penelitian, tindakan-tindakan dalam penelitian, dan fenomena atau kejadian yang terjadi selama penelitian berlangsung. Data tersebut dapat berupa wawancara atau transkrip *interview*, catatan lapangan, foto, serta dokumentasi atau arsip pribadi. Penelitian deskriptif diharapkan dapat memperoleh hasil-hasil yang mampu menggambarkan mengenai analisis strategi DPMPTSP Kabupaten Purworejo dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2020).

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti akan mengumpulkan data secara langsung yang didapatkan dari sumber primer atau dari tempat penelitian

dilakukan, yaitu DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Narasumber, narasumber akan memberikan tanggapan terhadap permasalahan dan memberikan informasi yang dimilikinya. Seluruh ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh narasumber memiliki arti penting bagi peneliti sehingga perlu dilakukan pencatatan, perekaman, dokumentasi foto, dan pengamatan dengan cermat. Narasumber penelitian ini, yaitu Sekretaris DPMPTSP Purworejo, Analis Investasi dan Permodalan Usaha, Pengelola Kerjasama Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Purworejo, serta dari Bidang Data dan Sistem Informasi DPMPTSP Kabupaten Purworejo.
2. Aktivitas atau peristiwa, melalui peristiwa tertentu maka peneliti akan mengetahui aktivitas yang dilakukan secara langsung di DPMPTSP Kabupaten Purworejo.
3. Lokasi penelitian, kondisi peristiwa dan aktivitas dapat diperoleh melalui tempat penelitian, yaitu di DPMPTSP Kabupaten Purworejo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau pihak lain yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada peneliti. Data ini dapat diakses melalui berbagai dokumen, laporan, publikasi, atau informasi yang telah dikumpulkan

oleh pihak lain. Data sekunder dikumpulkan untuk melengkapi sumber data primer dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini, antara lain:

1. Artikel jurnal dan situs *web* yang memiliki keterkaitan dengan strategi DPMPTSP dalam meningkatkan investasi.
2. Dokumen, memberikan informasi yang spesifik dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Misalnya, dokumen resmi berupa peraturan kebijakan, susunan organisasi, surat keputusan, serta arsip-arsip lainnya, dan dokumen pribadi berupa foto yang berkaitan dengan strategi DPMPTSP dalam meningkatkan investasi daerah.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Tahapan paling esensial dalam penelitian, yaitu teknik pengumpulan data karena yang menjadi tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data atau informasi terkait permasalahan penelitian agar dapat mencapai tujuan penelitian (Sugiyono, 2020). Berikut adalah teknik-teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi merupakan cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengamati situasi yang ada di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat memahami tentang subjek dan objek yang diteliti. Observasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu observasi partisipatif, observasi secara terang-terangan dan tersamar, observasi

tidak berstruktur. Berdasarkan klasifikasi observasi tersebut kemudian observasi partisipatif digolongkan lagi menjadi 4 golongan, yaitu observasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif, dan partisipasi lengkap. Pada penelitian ini, digunakan jenis observasi pasif, artinya peneliti melakukan pengamatan di lokasi penelitian tanpa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Metode ini digunakan untuk mengamati aspek-aspek yang berkaitan dengan pendukung pelaksanaan Strategi DPMPTSP Kabupaten Purworejo.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua individu untuk melakukan dialog tanya jawab agar mendapat informasi untuk mengkonstruksikan makna dari suatu topik. Wawancara dilakukan ketika peneliti ingin menemukan informasi dari informan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam melakukan wawancara dapat berpedoman pada panduan wawancara untuk menggali informasi mengenai pandangan, pendapat, dan pola pikir dari informan atau masalah penelitian. Wawancara dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur (Esterberg dalam Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu dengan cara peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian yang ditemui di lokasi penelitian dan mengikuti panduan wawancara yang telah disusun serta disiapkan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi menjadi penyempurna dari data observasi dan wawancara. Dokumentasi teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi dalam berbagai bentuk seperti buku, arsip, dokumen, maupun gambar yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data dokumentasi, yaitu data dari DPMPTSP Kabupaten Purworejo maupun dokumentasi pribadi peneliti berupa foto.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan langkah mengelola dan menyusun atau mengurutkan data menjadi pola, kategori, dan satuan uraian yang dilakukan pada saat menghimpun data pada periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020) terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis data, yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collecting*)

Pengumpulan data merupakan proses utama untuk menggali dan memperoleh data/informasi dari penelitian dengan lokus dan fokus yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara untuk mengumpulkan data primer atau data utama dan dilakukan pula observasi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka untuk mengumpulkan data tambahan sebagai penunjang data utama. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menganalisis hasil data berupa penjelasan atau tanggapan yang diberikan informan.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Reduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, berfokus pada hal-hal penting, serta mencari pola dari data yang diperoleh di lapangan sehingga informasi yang dikumpulkan akan memberikan pemahaman yang mendalam dan memberi kemudahan bagi peneliti. Tujuan utama penelitian kualitatif, yaitu untuk mendapatkan temuan, ketika melakukan penelitian di lapangan menemukan sesuatu yang belum memiliki pola maka harus menjadi fokus dalam reduksi data. Reduksi data pada penelitian ini, yaitu, penulis mengolah dan menyederhanakan hasil wawancara.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berarti hasil dari reduksi data yang dapat berupa teks, grafik, maupun tabel yang memiliki tujuan untuk menegaskan pemahaman penelitian agar lebih mudah untuk dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan mendeskripsikan Strategi DPMPSTSP Kabupaten Purworejo dengan menggunakan teks naratif.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Data Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan teliti melalui verifikasi atau meninjau ulang pada hasil data di lapangan sehingga data-data dapat diuji kualitasnya. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghimpun data dari lapangan, kemudian data diolah melalui reduksi data sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan.

1.9.8 Kualitas Data

Data yang telah didapatkan oleh peneliti harus memastikan keakuratan dan kevalidan data yang diperoleh sehingga diperlukan pemilihan metode yang sesuai untuk memastikan validitas data yang diperoleh. Pengujian kualitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode triangulasi. Triangulasi merupakan proses validasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, metode, atau waktu guna memastikan keakuratan dan memahami fenomena dari berbagai sudut pandang serta perspektif yang berbeda. Penelitian ini menerapkan model triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai narasumber, kemudian mencocokkannya dengan informasi dari sumber lain guna memperoleh data yang lebih akurat dan komprehensif. Triangulasi teknik, yaitu dilakukan dengan membandingkan hasil data yang diperoleh antara hasil wawancara dengan hasil observasi maupun hasil dokumentasi. Adapun triangulasi waktu, yaitu dilakukan membandingkan hasil observasi dan dokumentasi dalam waktu yang berbeda sehingga didapatkan data yang terpercaya karena perolehan data tidak hanya didapat dari satu sumber saja. Hasilnya, peneliti dapat menarik kesimpulan terkait dengan strategi DPMPTSP Kabupaten Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan iklim investasi daerah.